



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2024**



KOTAPINANG, MEI 2023

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024 disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Awal Rencana Kerja ini berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2005-2025.

Lebih lanjut isi Rancangan Akhir Rencana Kerja ini adalah gambaran perencanaan berbagai kebutuhan sebagai pendukung Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan nantinya, yang mana dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, dengan memperhatikan regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Mei 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN



H. SOFYAN HASIBUAN, SE, M.AP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690408 199803 1 009

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Kerja merupakan suatu proses mempersiapkan usaha atau kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh pimpinan, dimana hasilnya dapat diukur. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Kepala Daerah maka Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif menyusun Rencana Kerja OPD pada setiap tahunnya sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) tahunan. Dalam Rencana Kerja memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RKPD. Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD (2005-2025). Fungsi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam urusan pembinaan dan pengawasan diharapkan mampu memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Desa sehingga mereka dapat mendukung program pembangunan daerah secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana kerja yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan

perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan misi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 dengan memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja (dasar hukum) yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005 - 2025; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di Tahun 2024, lingkungan dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain :

- Sebagai acuan bagi seluruh jajaran pegawai Inspektorat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
- Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

2. Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD (2005-2025).

Secara spesifik tujuan disusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain :

- Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun; dan
- Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada rentang 1 (satu) tahun.

2.1. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi dan proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta keterkaitan Renja Inspektorat Daerah dengan Dokumen Pembangunan Lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renja

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan tahun berjalan Renja Inspektorat Daerah (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

2.4. Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai program dan kegiatan yang akan disampaikan pada RKPD Inspektorat Daerah Tahun 2024 berdasarkan analisis kebutuhan dan sinkronisasi dengan RPJMD 2021-2026.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Inspektorat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2022)

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2022) Dan Capaian Renja

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pencapaian Rencana Kerja Inspektorat Daerah menjadi indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renja tersebut juga merupakan referensi untuk menyusun Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD pada tahun selanjutnya. Evaluasi hasil Renja OPD dan pencapaian RENJA OPD sampai dengan tahun berjalan disajikan sebagaimana tabel 2.1 adalah evaluasi RENJA Inspektorat Daerah pada lima tahun terakhir.

Tabel 1
Evaluasi Hasil Renja OPD Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (P APBD 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit OPD Penganggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
II.	INSPEKTORAT DAERAH										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Sistem Kerja yang Akuntabel selama 1 tahun									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok		Dok		0	Dok	0%	0%	Inspektoral

02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	-	-	-	-	-	-	0	Dok	-	0%	0%	Inspektoral
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	-	-	-	-	-	-	0	Dok	-	0%	0%	Inspektoral
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	-	-	-	-	-	-	0	Dok	-	0%	0%	Inspektoral
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	-	-	-	-	-	-	0	Dok	-	0%	0%	Inspektoral
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	-	-	-	-	-	-	0	Lap	-	0%	0%	Inspektoral
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	26	Org/Bln	4.151.735.492	26	Org/Bln	3.432.674.218	3.432.674.218	26	Org/Bln	3.432.674.218	17%	14%	Inspektoral
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dok	48.387.490	6	Dok	22.875.250	22.875.250	6	Dok	22.875.250	9%	7%	Inspektoral
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	25.080.000	12	Dok	25.080.000	25.080.000	12	Dok	25.080.000	18%	7%	Inspektoral
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Lap	-	-	Lap	-	-	0	Lap	-	0%	0%	Inspektoral

07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap	-	Lap	-	0	Lap	-	0%	0%	Inspektorat
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pkt	-	Pkt	-	0	Pkt	-	0%	0%	Inspektorat
08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Org	20	Org	72.907.000	0	Org	72.907.000	0%	4%	Inspektorat
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Org	-	Org	73.199.500	0	Org	73.199.500	0%	20%	Inspektorat
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Org	-	Org	-	0	Org	-	0%	0%	Inspektorat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah										
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pkt	1	Pkt	5.035.700	0	Pkt	5.035.700	0%	10%	Inspektorat
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Pkt	1	Pkt	4.658.550	0	Pkt	4.658.550	0%	16%	Inspektorat
05	Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Celakan dan Penggandaan	Pkt	1	Pkt	6.698.940	1	Pkt	6.698.940	17%	5%	Inspektorat
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dok	-	Dok	-	0	Dok	-	0%	0%	Inspektorat
08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	58	Lap	242.133.005	13	Lap	228.091.513	4%	13%	Inspektorat

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Penambahan Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah											
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	Unit	-	48.285.000	0	Unit	-	0%	0%	Inspektoral
	05	Pengadaan Mebel	Unit	-	Unit	49.831.850	48.285.000	0	Unit	48.285.000	0%	21%	Inspektoral
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	Unit	17.717.920	17.471.400	0	Unit	17.471.400	0%	3%	Inspektoral
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	Unit	-	-	0	Unit	-	0%	0%	Inspektoral
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Daerah	48	Lap	-	2.273.912	756.000	0	Lap	756.000	0%	6%	Inspektoral
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Lap	-	66.026.186	53.561.225	14	Lap	53.561.225	19%	12%	Inspektoral
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Lap	-	216.159.456	213.000.000	14	Lap	213.000.000	19%	12%	Inspektoral
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah										
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9	Unit	-	39.630.000	39.095.121	2	Unit	39.095.121	4%	6%	Inspektoral

	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	98.576.809	1	Unit	87.186.732	1	Unit	87.186.732	6%	14%	Inspektoral
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58	Unit	21.430.000	7	Unit	8.325.000	7	Unit	8.325.000	2%	6%	Inspektoral
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	.	Unit	86.080.000	.	Unit	60.741.975	0	Unit	60.741.975	0%	31%	Inspektoral
Jumlah Target dan Realisasi per-Program															
						5.294.883.097	4.399.646.124								
						Rata Rata capaian Kinerja (%) per-Program									
						83,09%									
						Predikat Kinerja per-Program									
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														
	Terselenggaranya Peningkatan Sistem Pengawasan														
	Terselenggaranya Pengawasan Internal														
	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10	Lap	11.400.000	4	Lap	10.650.000	4	Lap	10.650.000	7%	6%	Inspektoral
	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	90	Lap	104.605.739	50	Lap	95.763.750	50	Lap	95.763.750	9%	12%	Inspektoral
	03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	10	Lap	43.420.183	30	Lap	14.936.000	30	Lap	14.936.000	50%	4%	Inspektoral
	04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	25	Lap	12.885.559	16	Lap	6.450.000	16	Lap	6.450.000	11%	7%	Inspektoral
	05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	120	Lap	112.335.871	40	Lap	102.195.000	40	Lap	102.195.000	6%	11%	Inspektoral

06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Kes		Kes		0	Kes		0%		Inspektoral
07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Dok	4	137.807.057	2	Dok	74.311.350	74.311.350	8%		Inspektoral
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu										
01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Lap	20	136.774.245	10	Lap	51.330.998	51.330.998	9%		Inspektoral
02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Lap	20	136.196.565	10	Lap	37.099.400	37.099.400	9%		Inspektoral
Jumlah Target dan Realisasi per-Program												
					695.405.219			392.736.498		12,03%		
					Rata-Rata capaian Kinerja (%) per-Program			56,48%			6,08%	
					Predikat Kinerja per Program							
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terselenggaranya Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi										
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan										
01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rok				0	Rek		0%		Inspektoral
02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Rok				0	Rek		0%		Inspektoral
	Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi										

01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	PD	94.818.600	PD	3.300.000	0	PD	3.300.000	0%	5%	Inspektoral
02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	-	PD	-	0	PD	-	0%	0%	Inspektoral
03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	1 Keg	194.593.627	1 Keg	88.426.095	1	Keg	88.426.095	17%	6%	Inspektoral
04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	-	PD	-	0	PD	-	0%	0%	Inspektoral
Jumlah Target dan Realisasi per-Program				289.412.227		91.726.095						
				Rata-Rata capaian Kinerja (%) per-Program			31,69%			2,78%	1,95%	
				Produk/Keluaran per-Program								
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terwujudnya Penambahan Ruang Kerja Inspektoral										
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terwujudnya Penambahan Ruang Kerja Inspektoral										

02	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Desain Perencanaan Perambatan Ruang Kerja Inspektorat	Pkt	Pkt	0	Pkt	0%	0%	Inspektorat
Jumlah Target dan Realisasi per Program									
Rata-Rata capaian Kinerja (%) per-Program									
Produk Kinerja per-Program									
Jumlah Total									
			6,279,700.543	4,884,108.717	4,884,108.717	4,884,108.717	0.00%	0.00%	0.00%
			Sasaran		Target				
			77,76%		18,54%				

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Keberadaan Inspektorat sebagai perpanjangan tangan Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawas bagi perangkat daerah yang lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Inspektorat Daerah harus mampu menjadi panutan bagi perangkat daerah yang lain dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam proses pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten diharapkan terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran pengawasan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah serta terciptanya aparatur yang bersih;
2. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah;
3. Tumbuh kembangnya sinergifitas pengawasan di lingkungan Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah;
4. Terlaksananya prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik.

Sebagai upaya menciptakan kondisi yang diinginkan maka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Inspektorat Daerah sebagai unit pembinaan dan pengawasan harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan, maka identifikasi dan evaluasi pelayanan dapat dilihat dari kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RENJA Inspektorat Daerah.

3.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016.

TUGAS

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut, "Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan".

FUNGSI

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

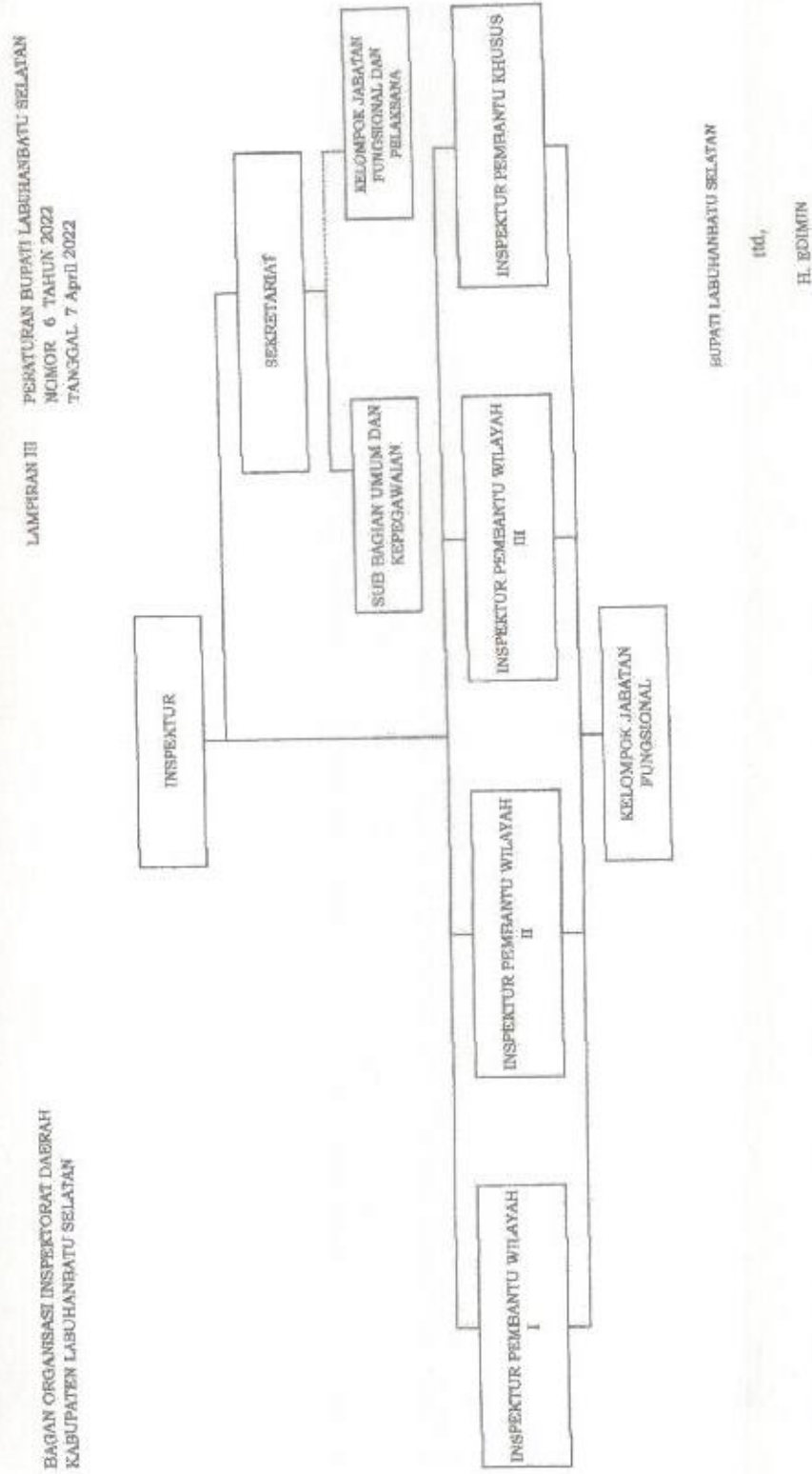
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari :

- A. Inspektur;
- B. Sekretaris, yang mana membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yakni :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Jabatan Fungsional Umum.
- C. Inspektur Pembantu Wilayah I
- D. Inspektur Pembantu Wilayah II
- E. Inspektur Pembantu Wilayah III
- F. Inspektur Pembantu Khusus
- G. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Ahli

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bawah ini :

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerjanya. Adapun kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain :

1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih.
2. Terjadinya koreksi internal terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Terpenuhinya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan (pengawasan masyarakat).
4. Terpenuhinya kualifikasi aparatur pengawasan secara merata sesuai dengan tuntutan profesi auditor.
5. Terpenuhinya pelayanan yang optimal terhadap objek pengawasan.

Namun peningkatan tersebut belum optimal, masih banyak potensi yang perlu digali. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam peningkatan optimalisasi pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah khususnya tenaga auditor mengingat saat ini semakin bertambah jenis dan substansi kinerja pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
2. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum dilaksanakan sepenuhnya kode etik pengawasan dan standar operasional prosedur untuk melaksanakan kegiatan pengawasan;
4. Belum ada persepsi/ mindset yang sama antar Stakeholders sehingga masih ada ego sektoral mengutamakan kepentingan masing-masing sehingga tidak sinergis mendukung tujuan dan sasaran;
5. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

3.4. Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 kegiatan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rancangan akhir rencana kerja OPD disusun sebagai langkah awal dalam proses perencanaan. Rancangan akhir rencana kerja OPD tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan tingkat realisasi anggaran pada tahun 2022 dan memperhatikan rencana kerja tahun 2023 serta memperhatikan kebijakan pengawasan dan program pengawasan nasional. Rancangan akhir rencana kerja OPD Tahun 2024 ini tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 nantinya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diharapkan rancangan akhir rencana kerja Tahun 2024 yang disusun ini tidak mengalami perubahan yang signifikan pada saat penetapan rencana kerja OPD final.

Tabel 2
Rancangan Akhir RKPD Inspektorat Daerah Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1				2	3	4	5	6	7
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6	01			INSPEKTORAT DAERAH					
6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.000.000	APBD
6	01	01	2.01	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	APBD
6	01	01	2.01	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	APBD
6	01	01	2.01	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya DPA-SKPD	1 Dokumen	-	APBD
6	01	01	2.01	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	APBD
6	01	01	2.01	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	APBD
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kotapinang	Tersusunnya Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	4.722.767.371	APBD

6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	50.312.421	APBD
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	36.960.000	APBD
6	01	01	2.02	05	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	435.958	APBD
6	01	01	2.02	07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	466.979	APBD
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kotapinang	Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	46.204.422	APBD
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kotapinang	Tersedianya Pegawai Auditor Ahli dan Meningkatkan Kualitas APJP	20 Orang	720.336.000	APBD
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotapinang	Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	21 Orang	79.587.733	APBD
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotapinang	Tersedianya Bimbingan Teknis ASN	2 Orang	80.356.000	APBD
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kotapinang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1 Paket	7.448.962	APBD
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kotapinang	Melengkapi Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	1 Paket	6.750.637	APBD
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kotapinang	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	15.100.000	APBD
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kotapinang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	29.584.384	APBD
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotapinang	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Luar dan Dalam Provinsi	56 Laporan	248.375.921	APBD
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Tersedianya Penambahan Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotapinang	Penambahan Mobil Lapangan Untuk Peningkatan Kinerja ASN	3 Unit	628.435.200	APBD

6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kotapinang	Penambahan Mebel Kantor Untuk Peningkatan Kinerja ASN	21 Unit	76.120.294	APBD
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kotapinang	Penambahan Peralatan dan Mesin Lainnya Untuk Peningkatan Kinerja ASN	18 Unit	359.324.783	APBD
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan dan Pembangunan Ruang Kerja Inspektoral	1 Unit	-	APBD
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotapinang	Terselenggaranya Ekspedisi Surat Menyurat	44 Laporan	2.226.595	APBD
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotapinang	Tersedianya Komunikasi dan Listrik Kantor	12 Laporan	96.000.000	APBD
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kotapinang	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	222.162.804	APBD
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kotapinang	Perpanjangan Pajak, BBM dan Perawatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	39.822.750	APBD
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotapinang	Perpanjangan Pajak, BBM dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	206.898.885	APBD
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kotapinang	Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya	58 Unit	37.460.000	APBD
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kotapinang	Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	85.500.000	APBD
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan Internal	1 Tahun		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kotapinang	Torawasnya Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	30.075.385	APBD
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kotapinang	Terawasnya Keuangan Pemerintah Daerah	90 Laporan	144.361.567	APBD
6	01	02	2.01	03	Revisi Laporan Kinerja	Kotapinang	Terevisinya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	79.500.000	APBD

6	01	02	2.01	04	Revisi Laporan Keuangan	Kotapinang	Terselenggaranya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Laporan	15.750.000	APBD
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan Desa	120 Laporan	178.632.702	APBD
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kotapinang	Terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Internal	12 Kesepakatan	11.550.000	APBD
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Kotapinang	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	100 Dokumen	150.112.907	APBD
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Tahun		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kotapinang	Terselenggaranya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	20 Laporan	144.012.609	APBD
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kotapinang	Terselenggaranya Penanganan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	140.157.298	APBD
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kotapinang	Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 Tahun		
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kotapinang	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10 Rekomendasi	41.323.400	APBD
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kotapinang	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10 Rekomendasi	43.927.200	APBD
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi	1 Tahun		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 Perangkat Daerah	15.750.000	APBD
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkat Daerah	48.934.660	APBD

6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kotapinang	Terwujudnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	205.418.022	APBD
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	48.954.000	APBD
Jumlah									9.106.177.649	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah selesai diantaranya RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Seluruh dokumen perencanaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun dengan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan nasional. RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga harus berpedoman pada dokumen RPJMN.

Berdasarkan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN sehubungan dengan kinerja Inspektorat Daerah, maka pemerintah mempunyai target antara lain kapabilitas APIP level 3 dan maturitas SPIP level 3 pada tahun 2022. Program pemerintah ini harus diwujudkan oleh seluruh pemerintahan daerah dan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah mencantumkan program ini pada RPJMD dan akan tetap menjadi prioritas pada tahun 2024 ini.

4.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Dalam rangka mewujudkan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka perlu dijabarkan kembali yang menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

Tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah selaku unsur pembinaan dan pengawasan dengan tidak melakukan pemeriksaan yang tumpang tindih antar sesama APIP pada audit dan memberikan sasaran dan jenis pemeriksaan yang tepat;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pengawas (auditor) sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan yang semakin banyak

dan mampu menindaklanjuti aduan dari pihak luar termasuk masyarakat sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan;

3. Meningkatkan informasi dan koordinasi terkait profil OPD secara terus menerus sehingga pengawasan dapat lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran;
4. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan baik dan benar berpedoman kepada peraturan dan kebutuhan.

Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kerja sama penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintahan dalam 1 tahun;
2. Terlaksananya pengawasan yang efektif;
3. Terkelolanya pegawai dengan baik mencakup tingkat kedisiplinan, wawasan dan pengetahuan aparatur;
4. Informasi tentang audit selalu diperoleh sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan;
5. Laporan dari hasil pengawasan bermanfaat, berkualitas dan dapat diandalkan sehingga dapat menjadi dasar bagi Bupati Labuhanbatu Selatan untuk pengambilan keputusan termasuk dalam melakukan pembinaan terhadap pegawai.

4.3. Program dan Kegiatan

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan kedalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Periode 2005-2026. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan pembangunan nasional yang harus dipedomani.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang

ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah Terwujudnya masyarakat "Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Sejahtera dan Bermartabat".

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam kehidupan yang beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis;
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN;
4. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan;
5. Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata;
6. Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, serta pemukiman yang layak.

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Inspektorat selaku APIP mengemban misi ke 3 (tiga) yaitu:

"Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN"

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Inspektorat Daerah Kabupaten . Hal ini ditunjukkan melalui :

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Salah satu upaya antisipasi yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun

isu strategis yang sangat mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah meningkatkan system pengawasan dan pengendalian internal yang efektif. Arah kebijakan yang harus diambil dalam rangka mendukung strategi ini adalah:

- Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal.
- Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh OPD.
- Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan dalam upaya pencegahan korupsi di internal pemerintahan daerah.

3. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Inspektorat Daerah adalah yang baik, bersih dan berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur Inspektorat Daerah dalam tata kelola dan pelayanan administrasi pengawasan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Daerah sampai dengan tahun berjalan, pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 dan kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Inspektorat Daerah, dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 serta prakiraan maju tahun 2025 direalisasikan melalui program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Maju Tahun 2025 (Rp)
					Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target		
1			2	3	4	5	6	7	8
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
6 01			INSPEKTORAT DAERAH						
6 01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
6 01 01 2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	7.807.717.879	8.320.293.125
6 01 01 2.01		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.000.000	9.150.000
6 01 01 2.01		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-
6 01 01 2.01		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-
6 01 01 2.01		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-
6 01 01 2.01		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-
6 01 01 2.01		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	-

6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	
6	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kotapinang	Tersusunnya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	30 Orang/Bulan	4.448.797.791
6	01	01	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	51.964.221
6	01	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	67.200.000
6	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	435.958
6	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kotapinang	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	466.979
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	
6	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kotapinang	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	23.780.358
6	01	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kotapinang	Tersedianya Pegawai Auditor Ahli dan Meningkatkan Kualitas AIP	Bertambahnya Pegawai Auditor Ahli dan Pegawai Auditor yang berkualitas	20 Orang	370.686.000
6	01	01	2.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotapinang	Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	21 Orang	113.302.633
6	01	01	2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotapinang	Tersedianya Bimbingan Teknis ASN	Meningkatkan Wawasan Pegawai Inspektorat	2 Orang	84.356.000
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	
6	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kotapinang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Terpeliharanya Penerangan Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	8.340.922
6	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kotapinang	Melengkapi Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	1 Paket	6.850.822

6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kotapinang	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	15.100.000	18.120.000
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kotapinang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Menambah Informasi dan Pengetahuan tentang Regulasi Pegawai Inspektorat	12 Dokumen	29.564.384	31.334.784
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotapinang	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Luar dan Dalam Provinsi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Luar dan Dalam Provinsi	56 Laporan	248.375.921	279.830.921
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Tersedianya Penambahan Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pegawai Inspektorat	1 Tahun		
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotapinang	Ponambahan Mobil Lapangan Untuk Peningkatan Kinerja ASN	Meningkatnya Ketersediaan Kendaraan Lapangan	3 Unit	628.435.200	-
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kotapinang	Penambahan Mebel Kantor Untuk Peningkatan Kinerja ASN	Meningkatnya Ketersediaan Mebel Kantor	21 Unit	76.120.294	50.234.779
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kotapinang	Penambahan Peralatan dan Mesin Lainnya Untuk Peningkatan Kinerja ASN	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor	18 Unit	359.324.783	103.725.820
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan dan Pembangunan Ruang Kerja Inspektorat	Tersedianya Pengawasan dan Pembangunan Ruang Kerja Inspektorat	1 Unit	-	-
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Tersusunnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotapinang	Tersusunnya Ekspedisi Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	44 Laporan	2.226.595	3.373.855
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotapinang	Tersedianya Komunikasi dan Listrik Kantor	Mengaktifkan Fungsi Gedung Kantor	12 Laporan	96.000.000	74.400.000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kotapinang	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Fungsi Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	222.162.804	222.162.804
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Tahun		

6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kotapinang	Perpanjangan Pajak, BBM dan Perawatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Perpanjangan Pajak, BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	39.922.750	39.922.750
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotapinang	Perpanjangan Pajak, BBM dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Perpanjangan Pajak, BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	206.898.665	206.898.665
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kotapinang	Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	58 Unit	37.460.000	37.460.000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kotapinang	Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	85.500.000	85.500.000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					894.152.468	917.572.468
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan Internal	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Tahun		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kotapinang	Terawasinya Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	30.075.395	32.325.395
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kotapinang	Terawasinya Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	90 Laporan	144.361.567	145.111.567
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Kotapinang	Tereviunya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	79.500.000	81.750.000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kotapinang	Tereviunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25 Laporan	15.750.000	17.250.000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan Desa	Laporan Hasil Pengawasan Desa	120 Laporan	178.632.702	186.132.702
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kotapinang	Terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Internal	Tersedianya Kerjasama Pengawasan Internal	12 Kesepakatan	11.550.000	12.000.000

6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kotapinang	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 Dokumen	150.112.907	151.612.907
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kotapinang	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Tahun		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kotapinang	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Tersedianya Tenaga Ahli Pemeriksaan	20 Laporan	144.012.609	147.622.609
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kotapinang	Terlaksananya Penanganan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Penanganan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	140.157.298	143.767.298
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					404.307.302	418.108.302
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Kotapinang	Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	1 Tahun		
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kotapinang	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Meningkatnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10 Rekomendasi	41.323.400	44.933.400
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kotapinang	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Meningkatnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	10 Rekomendasi	43.927.200	44.827.200
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi	Tersedianya Pendampingan dan Asistensi	1 Tahun		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 Perangkat Daerah	15.750.000	16.500.000

6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tersedianya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkat Daerah	48.934.680	49.684.680
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kotapinang	Terwujudnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	205.418.022	206.118.022
5	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kotapinang	Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tersedianya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	48.954.000	54.045.000
Jumlah										9.106.177.549	7.655.973.895

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Tahun 2024 tetap mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan. Terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan artinya adanya kesuaian antara perencanaan pembangunan pada periode Kepala Daerah saat ini dengan Kepala Daerah berikutnya sehingga target pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun ini disusun sebagai pedoman tahunan untuk peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan *Good Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Mei 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN



H. SOFYAN HASIBUAN, SE, M.AP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690408 199803 1 009

LAMPIRAN

Kode	Uraian Bidang Uraian Program/Kegiatan Uraian Kegiatan	Indikator Kuantitatif/Kualitatif Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula 2025		Peringkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2024	Page Indikator	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Status				
										Nasional	Daerah							
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penyusunan dan Pengantar/Verifikasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pengantar/Verifikasi Kinerja SKPD	297.848.510	25.000.000	36.960.000	1100 Dokumen	36.960.000	Kotapinang	APBD	✓	Terdapatnya Penyusunan dan Pengantar/Verifikasi Kinerja SKPD	1100 Dokumen	67.200.000	Inspektori
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kerangka Abstrak Tahun SKPD	Jumlah Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kerangka Abstrak Tahun SKPD	2.179.799	-	-	1 Laporan	435.958	Kotapinang	APBD	✓	Terdapatnya Laporan Kerangka Abstrak Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kerangka Abstrak Tahun SKPD	1 Laporan	-	Inspektori
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kerangka Abstrak Tahun SKPD	Jumlah Laporan Kerangka Abstrak Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kerangka Abstrak Tahun SKPD	3.356.553	-	-	12 Laporan	465.979	Kotapinang	APBD	✓	Terdapatnya Laporan Kerangka Abstrak Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kerangka Abstrak Tahun SKPD	12 Laporan	-	Inspektori
6	01	01	2.05	02	Administrasi Kepegawaian/Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelasnya	195.556.200	-	-	3 Paket	46.204.422	Kotapinang	APBD	✓	Terdapatnya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelasnya	3 Paket	23.780.358	Inspektori
6	01	01	2.05	09	Pembelian dan Penerimaan Pegawai Berhak Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berhak Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pembelian dan Penerimaan	2.019.280.000	72.907.600	720.336.000	20 Orang	720.336.000	Kotapinang	APBD	✓	Terdapatnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berhak Tugas dan Fungsi	20 Orang	370.000.000	Inspektori
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	370.616.543	73.199.500	79.387.733	21 Orang	79.387.733	Kotapinang	APBD	✓	Terdapatnya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	21 Orang	113.302.633	Inspektori
6	01	01	2.05	11	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	308.980.000	-	80.356.000	1 Orang	80.356.000	Kotapinang	APBD	✓	Terdapatnya Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1 Orang	84.356.000	Inspektori
6	01	01	2.06	01	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Infrastruktur Latar Belakang Bangunan Kantor yang Dibutuhkan	41.026.465	5.035.700	7.445.962	1 Paket	7.445.962	Kotapinang	APBD	✓	Terdapatnya Komponen Infrastruktur Latar Belakang Bangunan Kantor	1 Paket	8.340.922	Inspektori
6	01	01	2.06	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dibutuhkan	29.372.335	4.688.550	6.750.637	1 Paket	6.750.637	Kotapinang	APBD	✓	Terdapatnya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	6.850.822	Inspektori
6	01	01	2.06	05	Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan Pangsa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan Pangsa	135.480.049	6.609.940	15.100.000	1 Paket	15.100.000	Kotapinang	APBD	✓	Terdapatnya Barang Cetak dan Pengadaan	1 Paket	18.120.000	Inspektori
6	01	01	2.06	06	Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Pangsa	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Pangsa	147.380.160	-	29.564.384	12 Dokumen	29.564.384	Kotapinang	APBD	✓	Terdapatnya Bahan Baku dan Perawatan Pangsa	12 Dokumen	31.354.784	Inspektori
6	01	01	2.06	09	Pengadaan Rapor Kinerja dan Kualitas SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Kualitas SKPD	1.371.715.000	228.091.513	248.375.921	56 Laporan	248.375.921	Kotapinang	APBD	✓	Terdapatnya Rapor Kinerja dan Kualitas SKPD	56 Laporan	279.830.921	Inspektori

Kode	Unsur/Bidang Unsur/Program/Kegiatan	Indikator Program/Spesifikasi Kegiatan	Target Akhir Periode RPTMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Majo 2025		Prangkat Daerah Pemangkas Jomb
						Pagu Indikator	Lokasi	Sumber Data	Prioritas		Tingkat		Sasaran		
									Nasional	Daerah					
6	01	02	2.01	02	2.01	30.075.385	Kabupaten	APBD		✓	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	32.325.385	Inspektori	
6	01	02	2.01	02	2.01	144.361.567	Kabupaten	APBD	✓		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	90 Laporan	145.111.567	Inspektori	
6	01	02	2.01	02	2.01	79.500.000	Kabupaten	APBD	✓		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	81.750.000	Inspektori	
6	01	02	2.01	02	2.01	15.750.000	Kabupaten	APBD	✓		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Laporan	17.250.000	Inspektori	
6	01	02	2.01	02	2.01	178.632.702	Kabupaten	APBD	✓		Terlaksananya Pengawasan Desa	120 Laporan	186.132.702	Inspektori	
6	01	02	2.01	02	2.01	11.550.000	Kabupaten	APBD	✓		Terlaksananya Pengawasan Internal	12 Kelembagaan	12.000.000	Inspektori	
6	01	02	2.01	02	2.01	137.801.907	Kabupaten	APBD	✓		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBD	100 Dokumen	151.612.907	Inspektori	
6	01	02	2.02	02	2.02										
6	01	02	2.02	02	2.02	144.012.609	Kabupaten	APBD	✓		Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Negara/ Daerah	20 Laporan	147.622.609	Inspektori	
6	01	02	2.02	02	2.02	140.157.298	Kabupaten	APBD	✓		Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan	20 Laporan	143.767.298	Inspektori	
6	01	03	2.01	03	2.01										
6	01	03	2.01	03	2.01	41.323.400	Kabupaten	APBD	✓		Terlaksananya Kegiatan Teknis di Bidang Pengawasan	10 Rekomendasi	44.933.400	Inspektori	
6	01	03	2.01	03	2.01	43.927.266	Kabupaten	APBD	✓		Terlaksananya Kegiatan Teknis di Bidang Penyelenggaraan	10 Rekomendasi	44.827.266	Inspektori	
6	01	03	2.02	03	2.02										
6	01	03	2.02	03	2.02	15.750.000	Kabupaten	APBD			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Penyelenggaraan Kegiatan	10 Perangko Daerah	16.500.000	Inspektori	

Kode		Uraian Bidang Utama/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Pencapaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan						Kelompok Sasaran	Pencapaian Madya 2025		Peringkat Darah Penanggung Jawab			
							Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Sasaran				
											Nasional	Daerah							
6	01	01	2.02	01	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30.753.899.208	3.432.674.218	4.348.161.063	30 Orang/Bulan	4.722.767.371	Kolapinang	APBD		V	Terselenggara Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	4.448.797.791	Inspektoral
6	01	01	2.02	02	Pengelolaan Administrasi Pengawasan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	306.742.590	22.875.250	50.312.421	60 Dokumen	50.312.421	Kolapinang	APBD		V	Terselenggara Administrasi Pengawasan Tugas ASN	60 Dokumen	51.964.221	Inspektoral
6	01	01	2.02	03	Pemantauan dan Pengawasan Vertikal Keunggulan SKPD	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pengawasan Vertikal Keunggulan SKPD	297.848.510	25.080.000	36.960.000	100 Dokumen	36.960.000	Kolapinang	APBD		V	Pemantauan dan Pengawasan Vertikal Keunggulan SKPD	100 Dokumen	67.200.000	Inspektoral
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.179.790	-	-	1 Laporan	435.958	Kolapinang	APBD		V	Terselenggara Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	Inspektoral
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.326.555	-	-	12 Laporan	466.979	Kolapinang	APBD		V	Terselenggara Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	-	Inspektoral
					Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah														
6	01	01	2.05		Pengadaan Pakaian Dinas Resmi dan Alat Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Resmi dan Alat Kelengkapan	195.556.200	-	12.163.138	3 Paket	46.204.472	Kolapinang	APBD		V	Terselenggara Pakaian Dinas Resmi dan Alat Kelengkapan	3 Paket	23.780.358	Inspektoral
6	01	01	2.05	02	Pembinaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pelatihan dan Pembinaan	2.019.280.000	72.907.000	149.750.000	20 Orang	720.336.000	Kolapinang	APBD		V	Terselenggara Pembinaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	370.086.000	Inspektoral
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	370.616.545	73.199.500	27.587.011	21 Orang	79.587.733	Kolapinang	APBD		V	Terselenggara Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	21 Orang	113.302.633	Inspektoral
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	398.980.000	-	1.610.000	2 Orang	80.356.000	Kolapinang	APBD		V	Terselenggara Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2 Orang	84.356.000	Inspektoral
6	01	01	2.06		Administrasi Umum														
6	01	01	2.06		Pengelolaan Komponen Insentif	Jumlah Paket Komponen Insentif	41.026.465	5.035.700	7.680.642	1 Paket	7.448.962	Kolapinang	APBD		V	Terselenggara Komponen Insentif	1 Paket	8.340.922	Inspektoral
6	01	01	2.06	01	Insentif/Penghargaan Bagi Pegawai Kantor yang Berprestasi	Jumlah Paket Insentif/ Penghargaan Bagi Pegawai Kantor yang Berprestasi	23.372.535	4.638.550	4.663.416	1 Paket	6.750.657	Kolapinang	APBD		V	Terselenggara Bagian Logistik Kantor	1 Paket	6.850.822	Inspektoral

Kode		Uraian Bidang Uraian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode R. PJAD	Realisasi Capaian RSKPD Tahun 2022	Pencapaian Capaian Target RSKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Keuangan Pemerintahan										Pencapaian (tahun 2022)		
							Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Sasaran	Pencapaian Jawab			
											Nasional	Jumlah							
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Ruang Cetakan dan Pengadaan	135.480.049	6.698.940	8.484.690	1 Paket	15.100.000	Kotapinang	APBD			V	Tersedianya Ruang Cetakan dan Pengadaan	1 Paket	18.120.000	Inspektori
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bahan dan Perlengkapan Perdagangan-Industri yang Disediakan	147.380.160	-	-	12 Dokumen	29.564.384	Kotapinang	APBD			V	Tersedianya Bahan Bahan dan Perlengkapan Perdagangan-Industri	12 Dokumen	31.334.784	Inspektori
6	01	01	2.06	09	Penyediaan Ruang Kantor dan Konsultasi SKPD	1.571.715.000	228.091.513	190.094.921	56 Laporan	248.375.921	Kotapinang	APBD			V	Tersedianya Ruang Kantor dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	279.830.921	Inspektori
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Barang Milik Daerah, Pemungutan Lisensi dan Perizinan	201.918.000	-	-	3 Unit	628.435.200	Kotapinang	APBD			V	Tersedianya Kenderaan Dinas Lapangan	3 Unit	-	Inspektori
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel yang Disediakan	201.918.000	48.285.000	21.979.870	21 Unit	76.120.294	Kotapinang	APBD			V	Tersedianya Mebel Mebel Lainnya	21 Unit	50.234.779	Inspektori
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Perlengkapan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	509.797.315	17.471.400	80.357.200	18 Unit	339.324.783	Kotapinang	APBD			V	Tersedianya Perlengkapan Kantor atau Bangunan Lainnya	18 Unit	103.725.820	Inspektori
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.873.820.000	-	-	1 Unit	-	Kotapinang	APBD			V	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	-	Inspektori
6	01	01	2.08		Pengadaan Jasa Pencetakan dan Pencetakan Lainnya	11.377.050	756.000	2.271.739	44 Laporan	2.226.595	Kotapinang	APBD			V	Tersedianya Jasa Pencetakan Jasa Surat Meyorant	44 Laporan	3.375.855	Inspektori
6	01	01	2.08	01	Pengadaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.245.000	53.561.225	74.400.000	12 Laporan	96.000.000	Kotapinang	APBD			V	Tersedianya Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	74.400.000	Inspektori
6	01	01	2.08	04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.602.885.200	213.000.000	222.162.804	12 Laporan	222.162.804	Kotapinang	APBD			V	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	222.162.804	Inspektori
6	01	01	2.09		Pengadaan Jasa Pencetakan dan Pencetakan Lainnya	521.450.000	39.095.121	39.922.750	1 Unit	39.922.750	Kotapinang	APBD			V	Tersedianya Jasa Pencetakan dan Pencetakan Lainnya	1 Unit	39.922.750	Inspektori
6	01	01	2.09	01	Pengadaan Jasa Pencetakan dan Pencetakan Lainnya	547.550.000	87.189.732	103.488.665	12 Unit	206.838.665	Kotapinang	APBD			V	Tersedianya Jasa Pencetakan, Biaya Pencetakan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	103.488.665	Inspektori

[illegible]

